

PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023

Rabu, 19 Maret 2025



Pembangunan Ekonomi Inklusif



Barnat et al. (2019)

Inklusi diartikan sebagai partisipasi non-diskriminatif setiap individu dalam proses sosial dan ekonomi. **Pembangunan ekonomi inklusif** menggambarkan pembangunan ekonomi dengan **mempertimbangkan prinsip inklusi**.

Pembangunan ekonomi inklusif lebih dikenal secara luas dengan istilah **pertumbuhan ekonomi inklusif**.

Klasen (2010)

Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang **memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat** dan mencakup **partisipasi nondiskriminatif** sehingga seluruh lapisan masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Bappenas (2019)

Pembangunan ekonomi yang **menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan**, meningkatkan kesejahteraan, serta **mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah**.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana **tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia** baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek **pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan**, serta **akses dan kesempatan**. Angka indeks terdiri dari **3 Pilar** dan **8 Sub-pilar** serta **21 indikator** pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Kategori IPEI

$1 \leq \text{IPEI} < 4$	kurang memuaskan
$4 \leq \text{IPEI} < 8$	memuaskan
$8 \leq \text{IPEI} \leq 10$	sangat memuaskan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)



Pilar 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan **memperluas kesempatan ekonomi** dan **kesempatan kerja**, yang pada akhirnya **menciptakan pembangunan ekonomi inklusif**

Subpilar 1.1: Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan **salah satu syarat mutlak** pembangunan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi **menggambarkan aktivitas ekonomi** ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.

- Pertumbuhan PDRB riil per kapita
- Rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal
- Share sektor manufaktur terhadap PDRB

Subpilar 1.2: Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja yang luas secara langsung **meningkatkan tingkat produktivitas** dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi.

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase penduduk bekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam per minggu
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas

Subpilar 1.3 Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh **pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas**. Pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan infrastruktur sebagai **daya dukung** untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan.

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN
- Persentase penduduk yang memiliki/menguasai telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)



Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya **pemerataan ekonomi** ke seluruh lapisan masyarakat, **ketimpangan** dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah **harus dihapuskan**.

Subpilar 2.1: Ketimpangan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya **pemerataan ekonomi** ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

- Rasio pendapatan gini
- Sumbangan pendapatan perempuan
- Rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota

Subpilar 2.2: Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan **syarat cukup** pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan.

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)



Pilar 3: Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan **kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif** serta memberikan kesempatan **pengembangan kapabilitas sumber daya manusia** yang adil dan berkualitas

Subpilar 3.1: Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan **sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera** yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

Subpilar 3.2: Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah **pembangunan yang sudah lebih merata** juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk **mengejar laju pertumbuhan ekonomi**.

- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

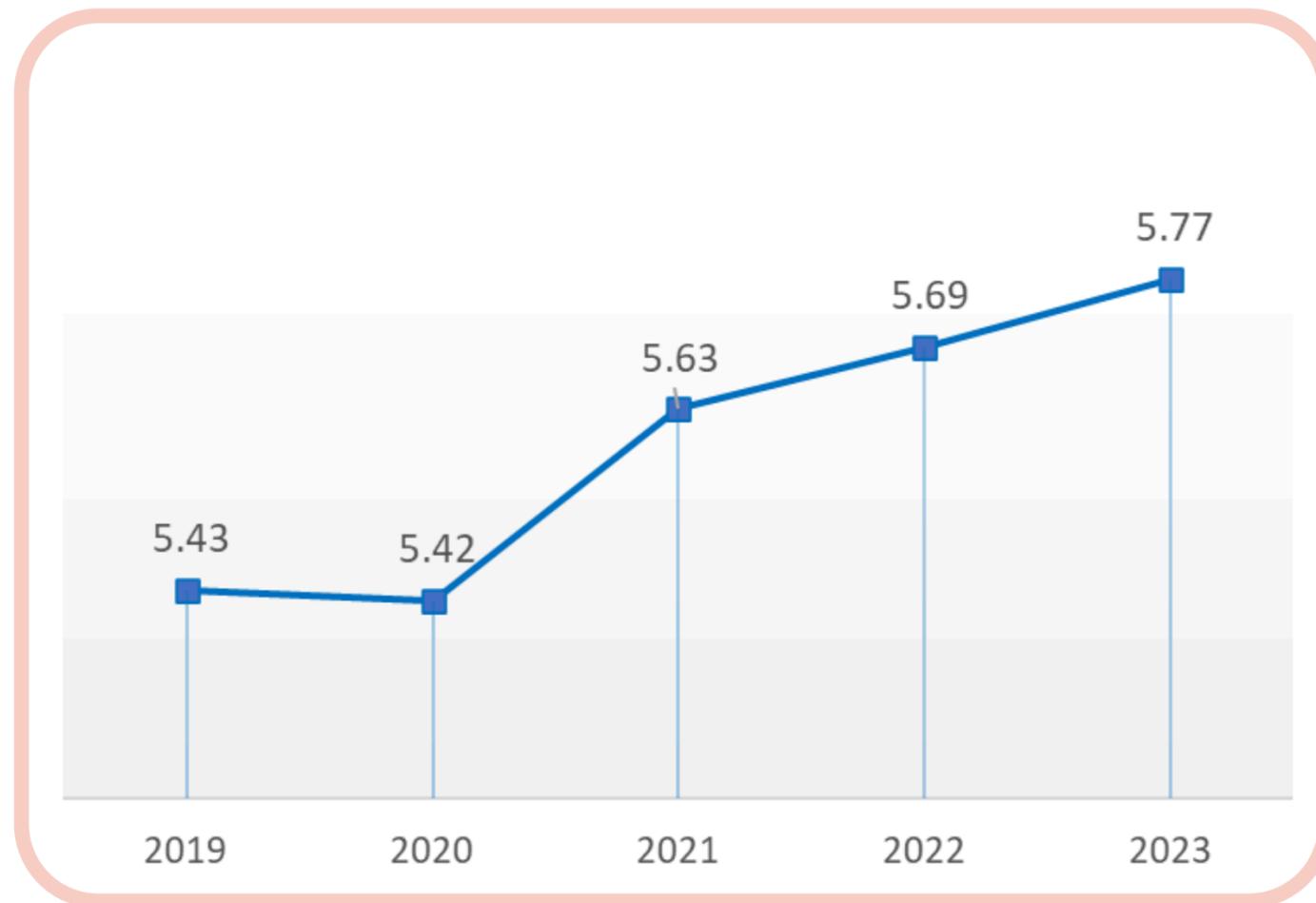
Subpilar 3.3 Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk **mendorong pertumbuhan ekonomi**. Maka **akses terhadap institusi keuangan** yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

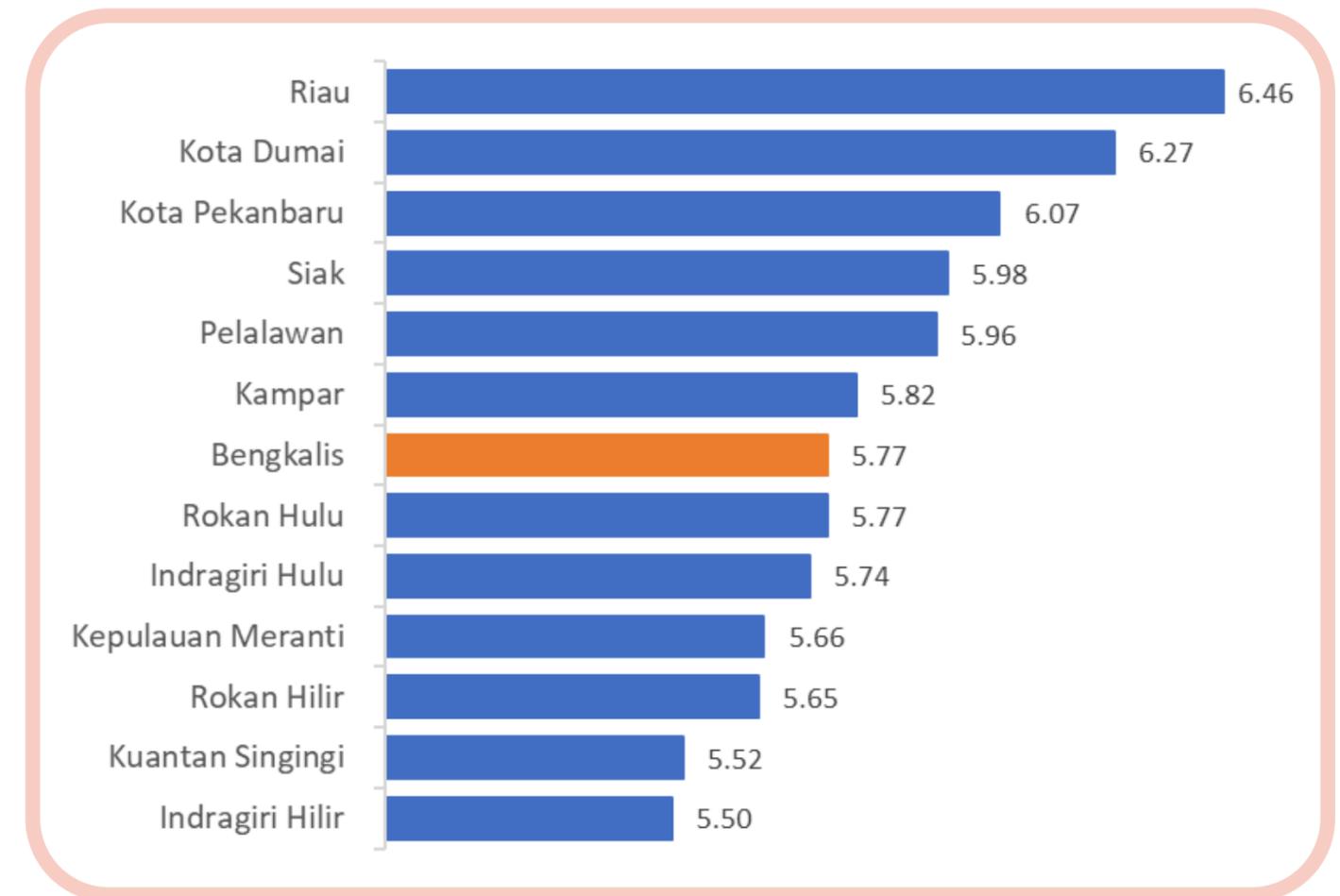
- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM

Sumber: inklusif.bappenas.go.id

IPEI Kabupaten Bengkalis

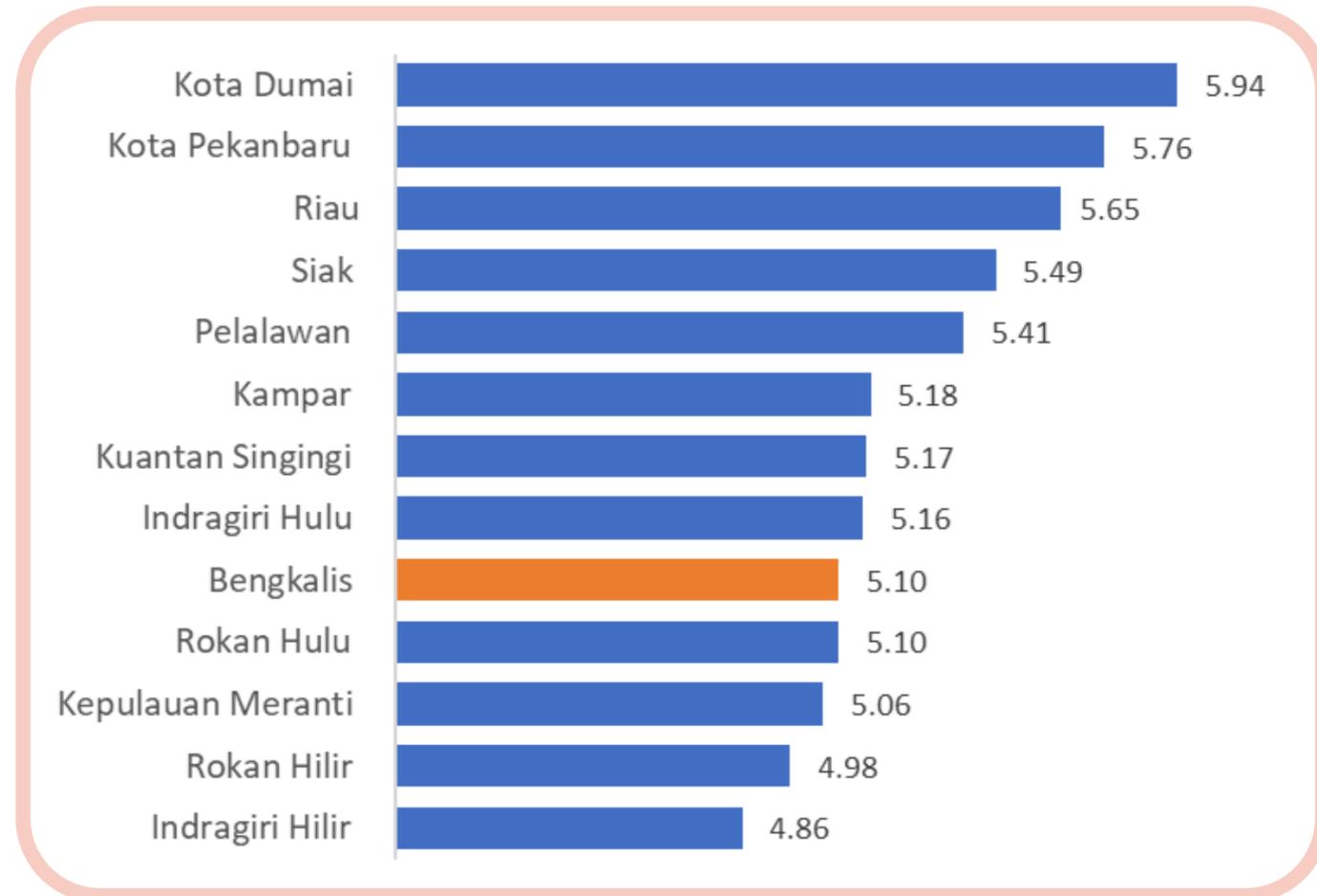


Gambar 1. IPEI Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 - 2023

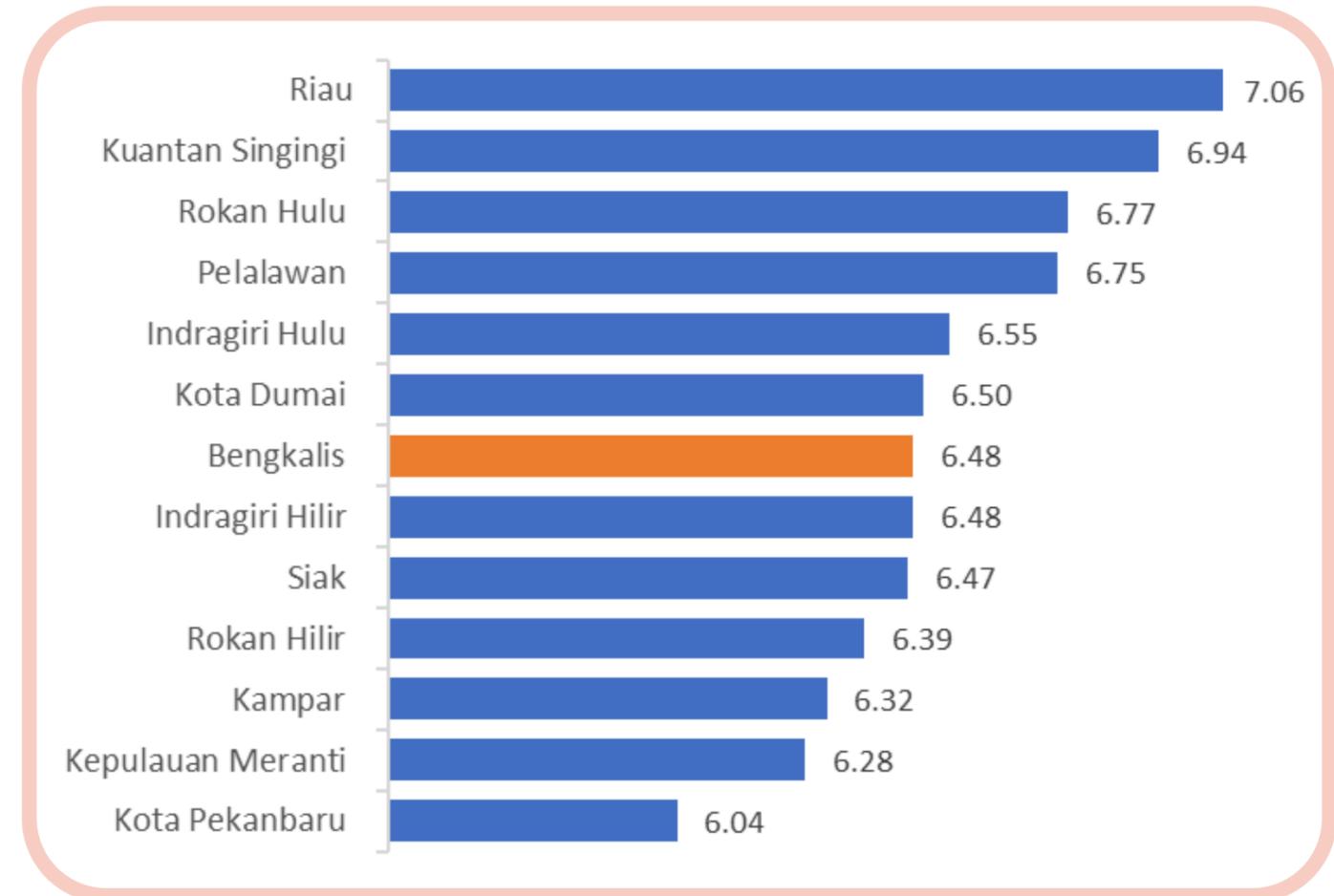


Gambar 2. IPEI Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

IPEI Kabupaten Bengkalis

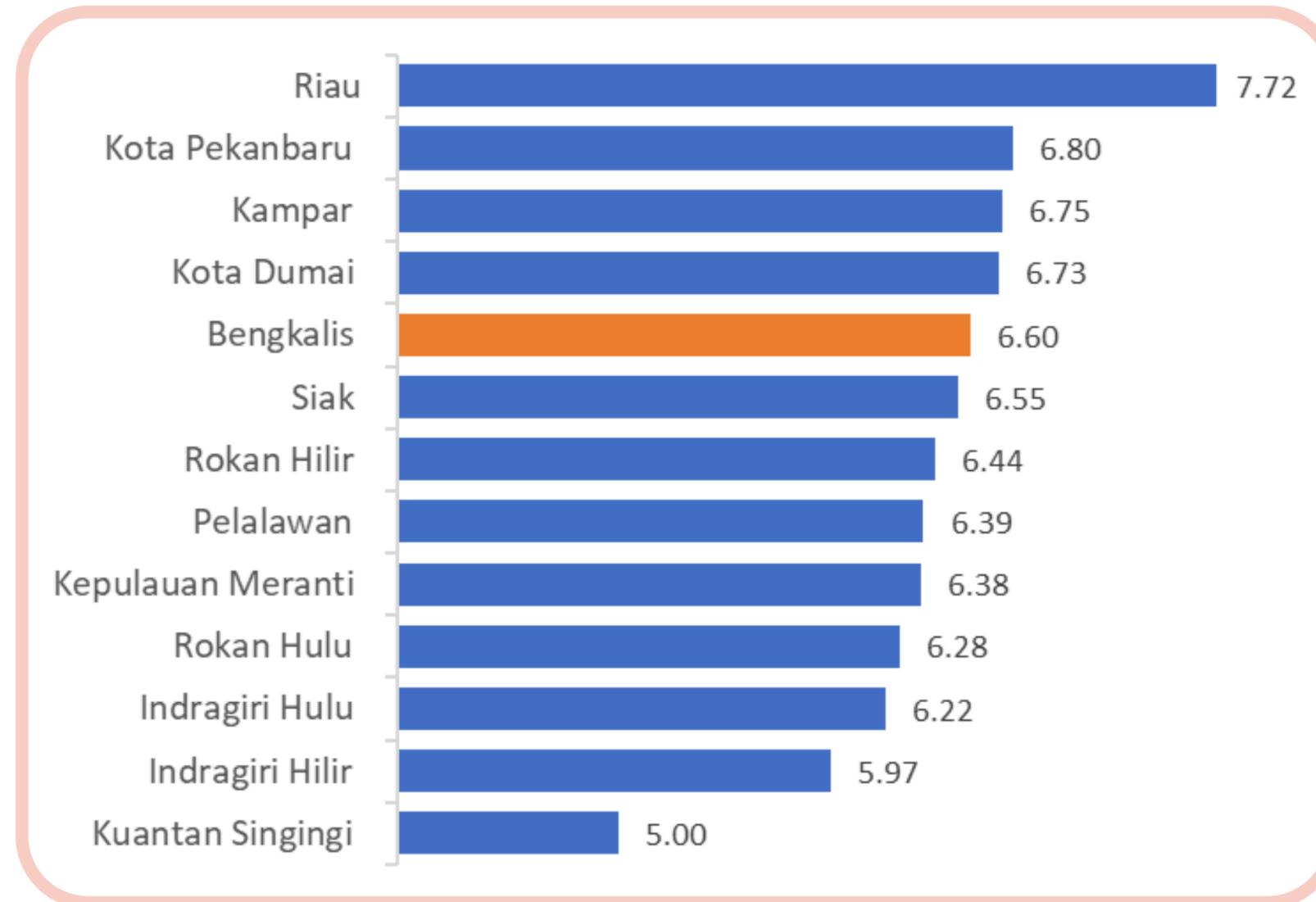


Gambar 3. Indeks Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

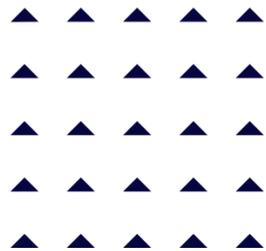


Gambar 4. Indeks Pilar Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

IPEI Kabupaten Bengkalis



Gambar 5. Indeks Pilar Perluasan Akses dan Kesempatan Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023



**ANALISIS PENGARUH
KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN
SEKTOR PARIWISATA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
DI INDONESIA TAHUN 2018-2022**



Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan dan Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2018–2022

Banyak negara yang telah **mencapai target pertumbuhan ekonomi** tetapi taraf kehidupan sebagian besar masyarakat **tidak meningkat** (Todaro & Smith, 2006).

Pendekatan pembangunan yang terlalu **berorientasi kepada pertumbuhan** telah menghasilkan eksklusi sosial, ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga **diperlukan** paradigma pembangunan baru yang lebih **bersifat inklusif** (Bappenas, 2019)



Meningkatkan **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Analisis Pengaruh Keterbukaan Perdagangan dan Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2018–2022



IPEI Indonesia memiliki **pertumbuhan** yang **lambat** jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, IPEI masih mencapai angka 6,13 sehingga masih **diperlukan strategi** untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mencapai target sebesar 6,54 pada tahun 2024.

Sektor pariwisata dapat **mendorong inklusivitas** dan **mengurangi kemiskinan** serta melestarikan budaya dan warisan lokal (ILO, 2019)

Perdagangan internasional dapat menjadi instrumen untuk **pertumbuhan inklusif** karena membuka peluang suatu negara untuk memanfaatkan **keunggulan komparatifnya** (World Bank, 2021)

Perubahan **jumlah wisatawan** dari tahun ke tahun cenderung **tinggi**, tetapi **IPEI** hanya mengalami pertumbuhan yang **rendah**.

2021:	Wisatawan	↑	25,39 %	IPEI	↑	0,46 poin
2022:	Wisatawan	↑	105,01 %	IPEI	↑	0,13 poin

Perubahan **keterbukaan perdagangan** di Indonesia terkadang **tidak** diiringi dengan perubahan yang **searah** dengan IPEI.

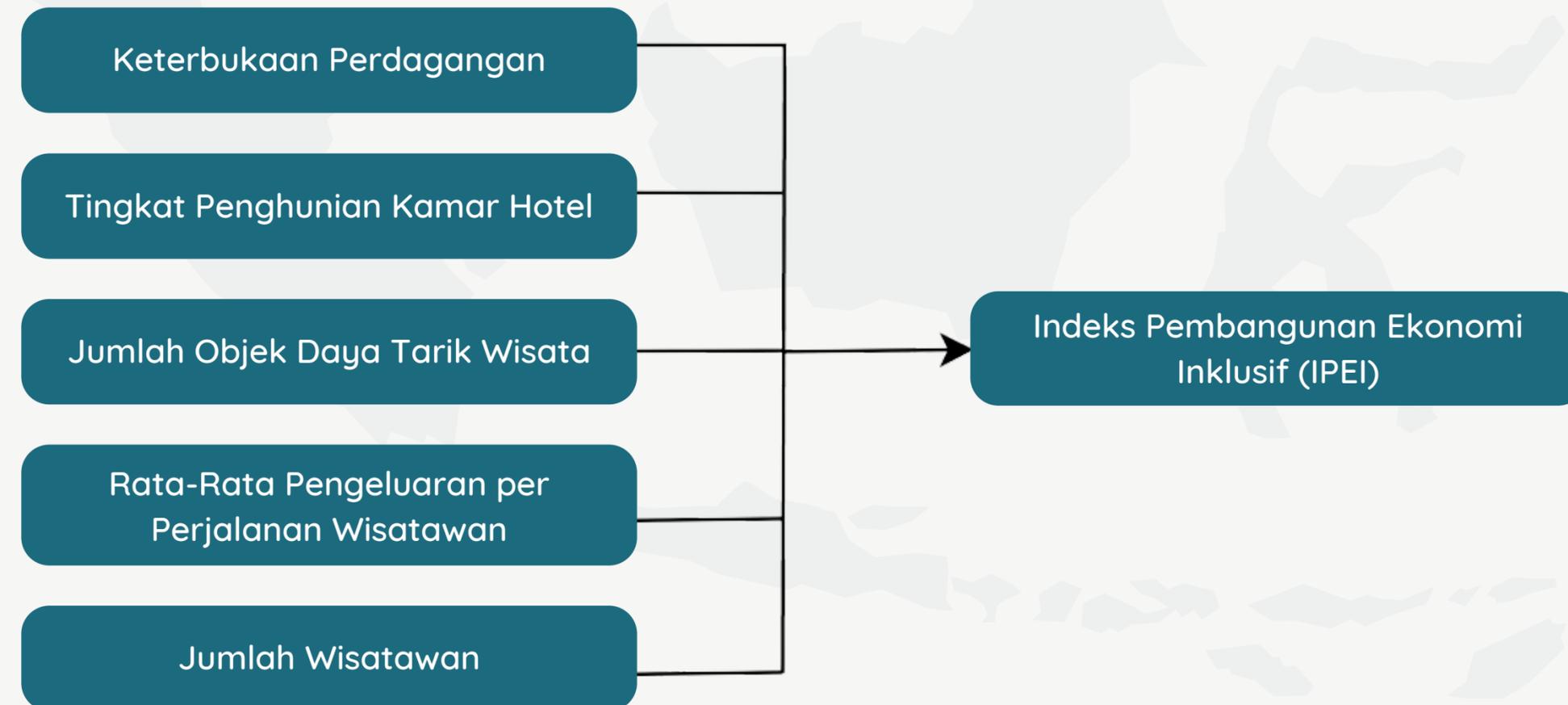
2019:	KP	↓	5,45 %	IPEI	↑	0,20 poin
2022:	KP	↑	5,20 %	IPEI	↑	0,13 poin



Cakupan Penelitian



Data sekunder dari **34 provinsi** di Indonesia tahun **2018 – 2022**



Regresi Data Panel – FEM



Persamaan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

$$\widehat{IPEI}_{it} = (4,2616 + \hat{\mu}_i) + 0,0031 KP_{it}^{***} + 0,0588 TPK_{it}^{***} + 0,0588 \ln OBJ_{it} + 0,3575 \ln RP_{it}^{***} + 0,0206 \ln WST_{it}$$

Keterangan

- *** : signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen
- $IPEI_{it}$: Indeks pembangunan ekonomi inklusif provinsi ke-i pada tahun ke-t
- KP_{it} : Keterbukaan perdagangan provinsi ke-i pada tahun ke-t
- TPK_{it} : Tingkat penghunian hotel provinsi ke-i pada tahun ke-t
- $\ln OBJ_{it}$: Logaritma natural jumlah usaha daya tarik wisata provinsi ke-i pada tahun ke-t
- $\ln RP_{it}$: Logaritma natural rata-rata pengeluaran per perjalanan wisatawan provinsi ke-i pada tahun ke-t
- $\ln WST_{it}$: Logaritma natural jumlah wisatawan provinsi ke-i pada tahun ke-t
- μ_i : Efek individu yang tidak terobservasi pada provinsi ke-i

Adjusted R-square : 0,9125

Keragaman IPEI sebesar 91,25 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Efek Spesifik Individu

No	Provinsi	Efek Individu	No	Provinsi	Efek Individu	No	Provinsi	Efek Individu
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Aceh	0,002818	12	Jawa Barat	0,022235	24	Kalimantan Utara	0,038769
2	Sumatera Utara	0,400502	13	Jawa Tengah	0,613642	25	Sulawesi Utara	0,201905
3	Sumatera Barat	0,128122	14	DI Yogyakarta	0,416978	26	Sulawesi Tengah	0,022211
4	Riau	0,262643	15	Jawa Timur	0,215584	27	Sulawesi Selatan	0,233632
5	Jambi	0,008144	16	Banten	-0,103030	28	Sulawesi Tenggara	0,149981
6	Sumatera Selatan	0,010609	17	Bali	0,492567	29	Gorontalo	-0,098585
7	Bengkulu	-0,003771	18	Nusa Tenggara Barat	0,040782	30	Sulawesi Barat	-0,106039
8	Lampung	-0,131570	19	Nusa Tenggara Timur	-0,817012	31	Maluku	-0,336454
9	Kep. Bangka Belitung	0,709425	20	Kalimantan Barat	-0,121807	32	Maluku Utara	-0,445151
10	Kepulauan Riau	0,027557	21	Kalimantan Tengah	0,037556	33	Papua Barat	-0,806206
11	DKI Jakarta	1,422516	22	Kalimantan Selatan	0,130530	34	Papua	-2,430731
			23	Kalimantan Timur	-0,188352			

Kesimpulan dan Saran



1

Keterbukaan perdagangan, tingkat penghunian kamar hotel, dan rata-rata pengeluaran per perjalanan wisatawan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia tahun 2018–2022. Sementara itu, **jumlah objek daya tarik wisata dan jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan** terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia tahun 2018–2022.

2

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerintah diharapkan:

- Tidak hanya berfokus untuk menarik kedatangan wisatawan tetapi juga pada promosi pariwisata yang dapat **mendorong wisatawan** untuk **belanja/melakukan pengeluaran**.
- **Tingkat penghunian kamar hotel** perlu lebih **ditingkatkan** misalnya dengan memberikan penawaran yang lebih menarik kepada wisatawan
- **Mengembangkan produk lokal** untuk dapat memasuki perdagangan internasional

Daftar Pustaka



- Bappenas. (2019). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Sebagai Indikator Kualitas Pembangunan Nasional Dan Daerah.
- Barnat et al. (2019). Inclusive Growth of the Eurasian Economic Union Member States: assessments and opportunities
- International Labour Office. (2019). Sustainable Tourism-A Catalyst for Inclusive Socio-economic Development and Poverty Reduction in Rural Areas, 1-16.
- Klasen, S. (2010). ADB Sustainable Development Working Paper Series Measuring and Monitoring Inclusive Growth, (12).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- World Bank. (2009). Inclusive Growth Analytics. World Bank Policy Research Working Paper. Diambil http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1410472



TERIMA KASIH